

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta hasil pengujian statistik dan analisis ekonomi mengenai determinan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2019–2024, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Bali. Hubungan ini mengindikasikan bahwa bertambahnya populasi di suatu kabupaten/kota secara langsung akan memperluas basis subjek pajak daerah. Seiring dengan peningkatan populasi, mobilitas masyarakat untuk mendukung aktivitas harian seperti bekerja, sekolah, dan berniaga juga ikut meningkat, yang kemudian memicu pertumbuhan kelompok wajib pajak baru. Ketika penambahan subjek pajak ini diikuti dengan penarikan pajak yang berjalan baik, pertumbuhan penduduk tersebut secara konsisten akan langsung menggerakkan kenaikan total realisasi kas penerimaan pajak kendaraan yang masuk ke kas daerah.
2. Jumlah Kendaraan Bermotor terbukti berpengaruh positif dan signifikan dalam menentukan besaran Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kendaraan bermotor di sini bertindak sebagai objek pajak utama, sehingga setiap terjadi kenaikan jumlah unit kendaraan terdaftar, baik roda dua maupun roda empat, maka potensi pajak yang bisa digali oleh pemerintah daerah juga otomatis semakin besar. Akumulasi aset kendaraan di tengah masyarakat Bali dari tahun ke tahun ini merupakan bentuk perluasan objek pajak riil yang aktif, sehingga memberikan kontribusi yang sangat kuat dalam memastikan target realisasi penerimaan tahunan daerah dapat tercapai dengan optimal.
3. Pengeluaran Per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Variabel ini menjadi

indikator penting yang mencerminkan tingkat daya beli, kesejahteraan, serta kondisi finansial masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Ketika pengeluaran per kapita masyarakat mengalami peningkatan, hal tersebut menandakan bahwa kapasitas ekonomi mereka sedang membaik, sehingga masyarakat memiliki kemampuan finansial yang lebih kuat untuk memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu (*ability to pay*). Kondisi ekonomi yang sehat ini secara langsung meminimalkan risiko terjadinya tunggakan pajak di lapangan, sehingga realisasi kas pajak yang diserap daerah menjadi lebih maksimal.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta perumusan kebijakan praktis;

5.2.1 Saran Teoritis

1. Pengembangan variabel di luar indikator makroekonomi. Model dalam penelitian ini masih terbatas pada tiga variabel struktural, yaitu jumlah penduduk, jumlah kendaraan, dan pengeluaran per kapita. Oleh karena itu, analisis pada studi mendatang perlu mempertimbangkan integrasi variabel kualitatif atau kebijakan dinamis dari pemerintah yang langsung menyentuh aspek perilaku wajib pajak. Variabel seperti efektivitas program pemutihan pajak (*tax amnesty*), tingkat kepatuhan masyarakat, serta ketegasan sanksi administrasi di lapangan dipandang dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dalam menjelaskan dinamika realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Pemanfaatan basis data dengan frekuensi yang lebih rapat. Penggunaan data tahunan dalam rentang waktu periode penelitian ini belum mampu menangkap fluktuasi jangka pendek maupun dampak bias musiman secara mendetail, terutama saat terjadi guncangan ekonomi eksternal seperti masa pandemi. Untuk mendapatkan analisis yang lebih tajam, penggunaan data dengan frekuensi yang lebih tinggi seperti data triwulanan atau bulanan sangat dianjurkan. Hal ini penting agar model penelitian mampu merekam

dampak kebijakan atau krisis ekonomi dari waktu ke waktu secara lebih dinamis dan *real-time*.

3. Perluasan ruang lingkup wilayah dan variasi metode. Penelitian ini hanya berfokus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang karakteristik ekonominya sangat bergantung pada sektor pariwisata. Untuk meningkatkan daya generalisasi, studi berikutnya dapat melakukan analisis komparatif dengan provinsi lain yang memiliki struktur ekonomi berbeda, misalnya daerah yang berbasis industri atau pertambangan. Selain itu, penggunaan metode ekonometrika dinamis lainnya juga dapat diterapkan untuk memperbandingkan efek jangka panjang dan jangka pendek secara lebih mendalam.
4. Penambahan Variabel *Dummy* Struktural dan Kebijakan: Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memasukkan variabel *dummy* ke dalam model estimasi untuk mengontrol dampak peristiwa luar biasa atau kebijakan daerah. Sebagai contoh, penggunaan *dummy* masa pandemi COVID-19 untuk membedakan fase krisis (2020–2021) dengan fase pemulihan, atau *dummy* implementasi kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang secara berkala diberlakukan oleh Bapenda Provinsi Bali guna menguji efektivitas kebijakan tersebut secara kuantitatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2.2 Saran Praktis

1. Bagi Pemerintah (Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kantor Bersama Samsat Provinsi Bali): Pemerintah Provinsi Bali disarankan untuk mengoptimalkan transparansi pembagian data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota secara berkala. Keterbukaan data ini bertujuan agar pemerintah daerah tingkat dua memiliki acuan yang akurat mengenai realisasi penerimaan pajak kendaraan serta dinamika pengeluaran konsumsi masyarakat di wilayah mereka. Dengan adanya transparansi tersebut, pemerintah kabupaten/kota dapat secara tepat menentukan arah kebijakan lanjutan (*data-driven policy*), seperti memetakan strategi intensifikasi pemungutan pajak daerah secara efektif, menyesuaikan target perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara lebih rasional,

hingga merumuskan intervensi kebijakan ekonomi lokal yang sesuai dengan tingkat daya beli masyarakat di setiap kawasan.

2. Bagi Pihak Kepolisian (Ditlantas Polda Bali): selaku mitra kerja dalam instansi Samsat yang mengelola data kendaraan bermotor, disarankan untuk memperkuat integrasi basis data kendaraan secara real-time dengan Bapenda. Kerja sama ini penting untuk meminimalkan adanya selisih data kendaraan aktif di lapangan dengan data wajib pajak. Di sisi lain, peningkatan intensitas kegiatan pengawasan atau razia simpatik bersama di jalan raya juga perlu dipertahankan guna memberikan efek ingatan bagi masyarakat yang lalai atau menunggak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraannya.
3. Bagi Masyarakat dan Wajib Pajak di Provinsi Bali: Kesadaran dari pihak masyarakat sendiri selaku wajib pajak di Provinsi Bali memegang peranan akhir yang paling menentukan keberhasilan target penerimaan ini. Seiring dengan tren peningkatan pengeluaran per kapita yang mencerminkan perbaikan kondisi finansial masyarakat, pemenuhan kewajiban pajak tahunan sebaiknya mulai disisihkan secara terencana. Masyarakat juga perlu didorong untuk lebih aktif memanfaatkan berbagai inovasi platform pembayaran online yang sudah disediakan pemerintah daerah agar prosesnya menjadi lebih praktis, cepat, sekaligus menghindari risiko denda keterlambatan.